



## Isu dan Permasalahan

Pemerintah kembali menggelar program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru Tertentu tahun 2025 sebagai kelanjutan dari pelaksanaan program serupa pada tahun 2024. Program ini bertujuan menuntaskan sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang belum memiliki Sertifikat Pendidik, sebagai bagian dari komitmen mewujudkan guru yang profesional, kompeten, dan sejahtera. Kebijakan ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Tiset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru.

PPG bagi Guru Tertentu tahun 2025 menasar guru-guru yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), aktif mengajar pada Tahun Ajaran 2023/2024, dan belum memiliki sertifikat pendidik. Program akan dilaksanakan secara bertahap, dengan pemanggilan peserta tahap pertama dimulai pada 8 hingga 17 Mei 2025. Berdasarkan kapasitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan ketersediaan anggaran, sebanyak 325 ribu peserta ditargetkan mengikuti tahap pertama ini. Rinciannya mencakup guru jenjang TK (22.310), SD (152.322), SMP (72.826), SMA (37.534), SMK (36.544), dan SLB (3.464), yang tersebar di 124 LPTK di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan pembelajaran pada program PPG bagi Guru Tertentu dirancang secara daring dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. Proses pembelajaran mandiri dilakukan melalui platform Merdeka Mengajar, yang memungkinkan guru untuk mengakses materi dan sumber belajar secara fleksibel tanpa harus meninggalkan tugas mengajarnya di sekolah. Model pembelajaran ini dinilai lebih adaptif terhadap kebutuhan guru dalam jabatan, sekaligus mendukung transformasi digital dalam sistem pendidikan nasional.

Berbeda dengan PPG bagi Guru Tertentu tahun 2024 yang masih dalam bentuk program *piloting* dan pelaksanaan dalam skala terbatas, pada 2025 program ini masuk ke tahap implementasi penuh, dengan cakupan peserta yang lebih luas, serta sistem seleksi dan pelaksanaan yang terintegrasi dengan Dapodik. Selain itu, di tahun 2025 juga dilakukan penyempurnaan dalam sistem pemanggilan peserta secara daring dan peningkatan kapasitas LPTK.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan PPG Guru Tertentu tahun 2024 meliputi ketimpangan daya tampung antar-LPTK, belum meratanya sosialisasi teknis dan administratif kepada guru sasaran, serta kendala teknis dalam sistem digitalisasi data dan proses verifikasi dokumen. Banyak guru juga menghadapi kesulitan memahami alur proses akibat minimnya bimbingan teknis di lapangan.

Agar pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu tahun 2025 berjalan lebih optimal dan menjangkau seluruh sasaran secara adil dan merata, sejumlah perbaikan perlu dilakukan. *Pertama*, diperlukan peningkatan koordinasi antara Kemendikdasmen dan LPTK agar kesiapan teknis, akademik, dan administratif dapat diselaraskan sejak awal pelaksanaan. *Kedua*, optimalisasi

platform digital PPG juga mendesak dilakukan, terutama untuk meminimalkan kesalahan dalam sistem pemanggilan dan verifikasi peserta. Pemerintah perlu menyediakan layanan bantuan teknis atau *helpdesk* nasional yang dapat diakses oleh peserta secara luas. Selain itu, penguatan kapasitas LPTK, terutama di wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T), menjadi kunci untuk menjaga kualitas pelaksanaan PPG secara merata. Pemerintah daerah juga diharapkan berkontribusi dalam mendukung penyelenggaraan program ini, baik melalui dukungan fasilitas, pendampingan, maupun anggaran pendukung non-APBN.

## Atensi DPR

Komisi X DPR RI memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan guru yang profesional, kompeten, dan sejahtera, terutama dalam mendukung program PPG bagi Guru Tertentu. Komisi X DPR RI perlu memastikan bahwa program PPG dapat berjalan dengan efektif dan dapat memenuhi kebutuhan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam konteks ini, perlu mendorong penguatan regulasi yang mendukung peningkatan kompetensi guru, penguatan kurikulum PPG yang lebih relevan dengan tuntutan dunia pendidikan, serta penyediaan anggaran yang memadai bagi pelaksanaan program tersebut termasuk dalam revisi RUU Sisdiknas yang mengatur sistem karier dan sertifikasi guru. Komisi X DPR RI juga perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan teknis pelaksanaan PPG, termasuk memastikan tidak terjadi penyimpangan, diskriminasi, atau ketidakadilan. Selain itu, Komisi X DPR RI juga perlu mendorong alokasi dana APBN secara cukup dan berkelanjutan, termasuk mendukung penguatan kapasitas LPTK dan pengembangan sistem digitalisasi PPG.

## Sumber

antaranews.com, 8 Mei 2025;  
detik.com, 8 dan 9 Mei 2025;  
kompas.com, 9 Mei 2025;  
kumparan.com, 8 Mei 2025;  
melintas.id, 8 dan 10 Mei 2025;  
ppg.dikdasmen.go.id, 8 Mei 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*